

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perhatian pemerintah dalam Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pada pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 ayat (1) yaitu, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, dengan bidang usaha yang dapat dijalankan sebagaimana tercantum masih dalam pasal 87 ayat (3) bahwa, BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagaimana tercantum pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan dan membangkitkan roda perekonomian di pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimasing-masing desa dibentuk berdasarkan peraturan desa melalui proses musyawarah desa antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan Desa serta tokoh masyarakat Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diuraikan pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 bertujuan; a) Meningkatkan perekonomian desa, b) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, d) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, f) Membuka lapangan kerja, g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun pertama sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 secara Nasional telah terbentuk sebanyak 5000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dibentuk dapat berkembang dan dapat mencapai tujuan sebagaimana tertuang pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 maka pengelolaan BUMDes harus dikelola secara professional dan mandiri sehingga dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.

Keberhasilan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan misinya terutama dalam hal peningkatan kinerjanya berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kompetensi pengelolanya. Sebab kompetensi pengelola merupakan karakteristik dasar yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja suatu organisasi, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Klemp (dalam Sienkiewicz et. Al 2014 : 17) bahwa: *Competency is a basic characteristics of a person, which determines the effective performance of tasks and/or the achievement of excellent results.* Oleh karena itu dibutuhkan pengelola yang mempunyai kompetensi dan memiliki kapasitas sesuai dengan bidang atau unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lebih lanjut Spencer dan Spencer 1993 (dalam Sanghi 2007:10) menyatakan bahwa:

“Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi yaitu; 1) Motiv (*motives*), 2) Watak (*traits*), 3) Konsep diri (*self concept*), 4) Pengetahuan (*knowledge*), dan 5) Keterampilan (*skill*)”.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi pengelola sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja organisasi BUMDes. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Liridon Veliu dan Mimoza Manxhari (2017) yang melihat dampak dari kompetensi terhadap kinerja organisasi bisnis Sme’s di Kosovo. Hasil penelitiannya menguatkan model teoritis dengan asumsi bahwa kompetensi diamati secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi bisnis Sme’s di Kosovo.

Pengelola yang memiliki kompetensi mampu melihat potensi yang ada di desa baik potensi sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai komoditi usaha maupun potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan usaha sekaligus sebagai upaya membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Pemanfaatan dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia ini selain sebagai upaya membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat juga berdampak langsung pada berkurangnya pengangguran di desa. Dengan diberdayakannya potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat menurunkan angka kemiskinan di desa. Pemanfaatan sumber daya manusia kedalam pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) secara tidak langsung melibatkan mereka dalam proses pengembangan dan kemajuan organisasi BUMDes.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang tujuan yang ingin dicapai dibentuknya organisasi BUMDes itu sendiri. Perlu pula pemberian pemahaman akan nilai-nilai atau norma-norma yang dianut organisasi yang telah disepakati sebelumnya serta sudah menjadi budaya dalam organisasi BUMDes. Deal dan Kennedy (dalam Alvesson, 2002:43) menyatakan bahwa budaya yang kuat akan mendorong kinerja. Sementara Denison (1990:15) mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai kunci pengungkit perubahan organisasi dalam meningkatkan kinerja. Organisasi yang berkinerja tinggi memiliki budaya yang tidak saja kuat tetapi juga adaptif atau memiliki fokus internal dan fokus eksternal yang kuat. Fokus internal dicirikan oleh adanya konsistensi (*consistency*) dan keterlibatan (*involvement*), sedangkan fokus eksternal berupa kemampuan beradaptasi (*adaptability*) terhadap lingkungan dan misi (*mission*) yang jelas. Dari kedua pandangan ini jelas bagi kita bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja sebuah organisasi.

Budaya Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana budaya organisasi pada umumnya senantiasa dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya dari perilaku organisasi. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Susita Asree, Mohamed Zain, dan Mohd Rizal Razalli, (2010) dengan objek yang diteliti mengenai kompetensi pimpinan, budaya organisasi, dan daya

tanggap terhadap kinerja perusahaan pada 88 hotel yang ada di Malaysia yang dipublikasikan pada *International Journal of Contemporary Hospitality Management* Vol. 22 No. 4, 2010. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi pimpinan, budaya organisasi dan daya tanggap mempunyai hubungan yang positif terhadap peningkatan kinerja organisasi perusahaan. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa kompetensi pimpinan dan budaya organisasi dan daya tanggap merupakan faktor-faktor penting dalam peningkatan kinerja perusahaan dalam hal ini 88 hotel yang ada di Malaysia.

Untuk menjadi seorang wirausahawan setiap individu harus memiliki sikap perilaku wirausaha yang punya visi atau mampu melihat ke masa depan, punya pemikiran yang penuh dengan perhitungan dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Veciana (dalam dalam Cuervo 2007:53) bahwa perilaku wirausaha memuat enam dimensi yang relevan digunakan untuk dianalisis yaitu:

“1) *The ability to search and gather information* (kemampuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi), 2) *The ability to identify opportunities* (kemampuan untuk mengidentifikasi peluang), 3) *The ability to deal with risk* (kemampuan untuk menangani resiko), 4) *The ability to establish relationships and networks* (kemampuan untuk membangun relasi dan jaringan), 5) *The ability to make decisions under uncertainty and ambiguity* (kemampuan untuk membuat keputusan di bawah ketidakpastian dan ambiguitas), 6) *The ability to learn from experience* (kemampuan untuk belajar dari pengalaman)”.

Mencermati uraian di atas dapat dikemukakan bahwa seorang wirausahawan setidaknya harus memiliki karakter-karakter tersebut. Demikian juga halnya dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perilaku wirausaha yang memiliki visi atau mampu melihat ke masa

depan, punya pemikiran dengan penuh perhitungan dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus memiliki ciri dan karakter wirausaha sebagaimana dikemukakan Veciana pada uraian di atas. Siti Herdianti Elza, Rachmad Pambudy, dan Burhanuddin (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh perilaku wirausaha terhadap kinerja UKM agroindustri perikanan wirausaha wanita di Kota Padang yang dipublikasikan pada *International Journal of Science and Research (IJSR)* ISSN (Online): 2319-7064 Volume 5 Issue 10, October 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku wirausaha terutama faktor responsif terhadap peluang usaha berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan UKM agroindustri perikanan di Kota Padang.

Perilaku wirausaha pengelola juga harus dapat mencerminkan sikap positif yaitu selalu berpikir dan berbuat yang terbaik sehingga mampu mengubah tantangan menjadi peluang demi kemajuan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika perilaku wirausaha pengelola menunjukkan sikap yang positif maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab peningkatan kinerja merupakan salah satu ukuran penilaian berhasil tidaknya suatu organisasi.

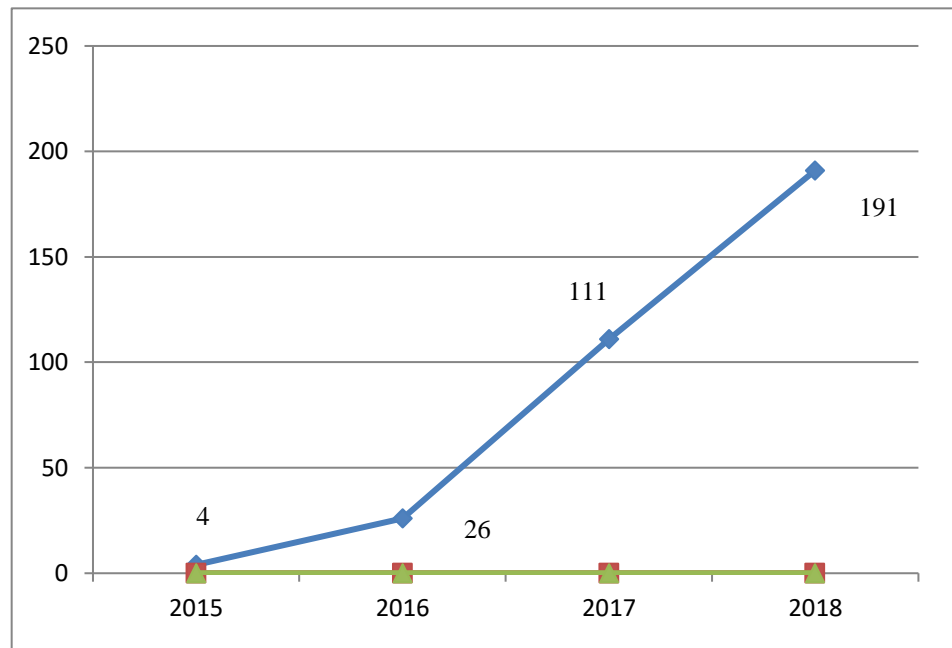
Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan oleh Kumorotomo (1996:57) bahwa untuk melihat kinerja suatu organisasi terutama pada organisasi profit milik pemerintah terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi antara lain:

efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba; *efektivitas*, berkaitan dengan apakah tujuan dari didirikannya organisasi dapat tercapai?; *keadilan*, mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan berkaitan dengan ketercukupan dan kepatasan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik; *daya tanggap*, organisasi bisnis milik pemerintah harus merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat.

Nnamani Emeka dan Ajagu Helen Eyuche dari Universitas Teknologi Unugu Nigeria melakukan penelitian tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap kinerja organisasi pada perusahaan Juhel yang dipublikasikan pada jurnal *World Engineering & Applied Sciences Journal* 5 (3): 75-84, 2014. Penelitian ditujukan untuk mengetahui sejauh mana faktor lingkungan dalam meningkatkan kinerja organisasi perusahaan. Dengan menggunakan metode survey pada sampel 297 responden diperoleh hasil penelitian bahwa lingkungan kerja dan budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi perusahaan. Sebaliknya lingkungan kerja dan budaya yang kurang nyaman akan menyebabkan rendahnya kinerja organisasi. Dari teori dan hasil penelitian tersebut dapat kita pahami bahwa kinerja organisasi akan meningkat apabila menerapkan model pengukuran melalui empat kriteria yang dikemukakan Kumorotomo dan juga memperhatikan faktor lingkungan kerja serta budaya organisasi sebagaimana diuraikan di atas.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo melalui pemerintah desa telah membentuk dan mendirikan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak Tahun 2015. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo perkembangan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini:



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pendirian BUMDes Kabupaten Gorontalo

Pada gambar 1.1 di atas nampak bahwa perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2018 berdasarkan data yang diperoleh bahwa keseluruhan desa di Kabupaten Gorontalo telah dibentuk sebanyak 191 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gorontalo saat ini telah memberi dampak bagi pengembangan usaha masyarakat yang ada di desa meskipun selama hampir 2 tahun terakhir diperhadapkan pada kondisi pandemic covid-19. Hal ini dibuktikan dengan adanya prosentase aktivitas

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sampai dengan akhir tahun 2021 masih tetap eksis menjalankan usahanya sebagaimana data pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Prosentase Aktivitas Perkembangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se - Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Prosentase Jumlah BUMDes			
			Aktif	%	Tidak Aktif	%
1.	Telaga	9	6	66,67	3	33,33
2.	Batudaa	8	4	50	4	50
3.	Tibawa	16	9	56,25	7	43,75
4.	Batudaa Pantai	9	5	55,56	4	44,44
5.	Boliyohuto	13	6	46,15	7	53,85
6.	Telaga Biru	15	9	60	6	40
7.	Bongomeme	15	8	53,33	7	46,67
8.	Tolangohula	15	9	60	6	40
9.	Mootilango	10	7	70	3	30
10.	Pulubala	11	7	63,64	4	36,36
11.	Limoto Barat	10	7	70	3	30
12.	Tilango	8	6	75	2	25
13.	Tabongo	9	4	44,44	5	55,56
14.	Biluhu	8	5	62,5	3	37,5
15.	Asparaga	10	6	60	4	40
16.	Telaga Jaya	5	4	80	1	20
17.	Bilato	10	6	60	4	40
18.	Dungaliyo	10	8	80	2	20
Total		191	117	61,26	74	38,74

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021*

Dari tabel 1.1 di atas nampak bahwa sebahagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa kecamatan terindikasi sebagian tidak aktif. Secara umum jumlah BUMDes yang telah aktif adalah sekitar 61.26 %, sebanyak 38.74 % BUMDes yang belum aktif. Dari data di atas juga terdapat 74 BUMDes yang tidak aktif yang tersebar pada Tujuh Kecamatan; yaitu Boliyohuto sebanyak 53,85 % BUMDes tidak aktif, Batudaa sebesar 50 %, Bongomeme 46.67 % dan Mootilango sebesar 30 %, sedangkan Tibawa dan Tolangohula masing-masing sebesar 43.75 % dan 40 %.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa Perkembangan BUMDes di Kabupaten Gorontalo selain dapat dilihat dari keaktifan BUMDes, juga dapat dilihat dari pengklasifikasian BUMDes itu sendiri. Data yang diperoleh peneliti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo terdapat empat klasifikasi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu, Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju sebagaimana tertera pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Data Klasifikasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Klasifikasi BUMDes			
			Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1.	Telaga	9	6	2	1	0
2.	Batudaa	8	5	2	0	1
3.	Tibawa	16	7	6	2	1
4.	Batudaa Pantai	9	5	4	0	0

5.	Boliyohuto	13	3	2	7	1
6.	Telaga Biru	15	11	3	1	0
7.	Bongomeme	15	8	7	0	0
8.	Tolangohula	15	8	6	1	0
9.	Mootilango	10	5	5	0	0
10.	Pulubala	11	4	4	3	0
11.	Limoto Barat	10	5	4	1	0
12.	Tilango	8	3	3	2	0
13.	Tabongo	9	4	4	0	1
14.	Biluhu	8	5	2	1	0
15.	Asparaga	10	9	1	0	0
16.	Telaga Jaya	5	3	1	1	0
17.	Bilato	10	4	4	1	1
18.	Dungaliyo	10	2	6	1	1
		191	97	66	22	6

Sumber: *Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021*

Dari tabel 1.2 di atas nampak bahwa dari 191 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk dari sejak tahun 2015 berdasarkan klasifikasi perkembangan di atas sebanyak 6 BUMDes yang masuk pada kategori *maju*, 22 BUMDes kategori *berkembang*, 66 BUMDes kategori *tumbuh*, dan 97 BUMDes kategori *dasar*. Penentuan klasifikasi BUMDes ini diperoleh dari bobot penilaian dari masing-masing aspek yang dengan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *Maju* dengan nilai perolehan sebesar 86 sampai dengan 100, *Berkembang* nilai perolehan sebesar 75 sampai dengan 85, *Tumbuh* nilai perolehan sebesar 50 sampai dengan 75, dan *Dasar* nilai perolehan sebesar 25

sampai dengan 49. Pedoman penentuan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada 6 (enam) aspek dengan pembobotan penilaian tiap aspek sebagai berikut;

- a. Kelembagaan dengan bobot 20 %,
- b. Aturan dengan bobot 10 %,
- c. Usaha dengan bobot 25 %,
- d. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan bobot 10 %,
- e. Permodalan dan asset dengan bobot 15 % serta
- f. Dampak BUMDes terhadap masyarakat dan Desa dengan bobot 20 %.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas dapat dikatakan bahwa sebahagian besar BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih pada klasifikasi dasar dan tumbuh dengan jumlah 163 atau sebesar 85,34 %, dan sebesar 14,66 % atau sebanyak 28 BUMDes pada klasifikasi berkembang dan maju.

Berdasarkan fenomena lapangan menyangkut pembentukan organisasi BUMDes sebahagian belum dapat menunjukkan kinerja keberhasilan dalam mendapatkan laba. Terdapat beberapa BUMDes yang telah dibentuk dilihat dari efisiensi, belum dapat mewujudkan tujuan utama didirikannya BUMDes. Sebahagian belum menunjukkan kinerja usaha yang baik terutama dalam keberhasilan mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi yang merupakan sumber potensi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha BUMDes, hal ini nampak pada masih terdapat 163 BUMdes yang masih pada klasifikasi dasar dan klasifikasi tumbuh. Dari segi efektivitas tujuan pendirian BUMDes sebahagian belum memberikan gambaran capaian terutama

yang berkaitan dengan misi dari BUMDes yang berfungsi sebagai agen pembangunan perekonomian di desa. Sebahagian belum mampu mewujudkan memenuhi tujuan pendirian BUMDes itu sendiri misalnya menampung dan mengelola hasil-hasil produksi pertanian masyarakat, hal ini nampak dari masih adanya masyarakat petani yang menjual hasil produksinya kepada para pedagang pengumpul atau pihak swasta lainnya.

Dari segi keadilan terutama menyangkut distribusi dan layanan yang diselenggarakan oleh sebahagian BUMDes belum dapat mencukupi dan sesuai kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan akan sarana penunjang untuk produksi pertanian misalnya pupuk, kebutuhan akan bahan pokok dan lain-lain. Pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan dan merata kepada yang membutuhkan.

Selanjutnya dilihat dari segi daya tanggap berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan organisasi BUMDes untuk membantu para konsumen dan merespon permintaan konsumen, serta menginformasikan kapan layanan akan diberikan dan kemudian memberikan layanan secara cepat dan tepat. Umumnya usaha yang dijalankan BUMDes sebahagian besar bergerak pada usaha simpan pinjam, pengembangan jenis usaha yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa belum secara optimal dilakukan.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap pembentukan dan pendirian BUMDes di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini akan menelaah bagaimana pengaruh kompetensi pengelola dan budaya organisasi serta perilaku

wirausaha terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo. Penelitian akan lebih diarahkan pada BUMDes yang memiliki unit-unit usaha produktif berupa usaha pertanian/agrobisnis, perikanan, industri kreatif, jasa pertanian, perdagangan/penjualan, simpan pinjam dan usaha pariwisata serta usaha lainnya. Unit-unit usaha ini dianggap dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Desa, serta peningkatan kinerja BUMDes.

Bertolak dari uraian-urian tersebut di atas maka tema utama yang dijadikan judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kompetensi, Budaya Organisasi dan Perilaku Wirausaha Terhadap Kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Organisasi BUMDes yang dibentuk belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai wadah yang dijadikan tempat dalam pengelolaan usaha.
2. Dari segi kompetensi, pengelola BUMDes belum menunjukkan kinerja keberhasilan dalam mendapatkan laba.
3. Sebahagian BUMDes belum dapat memanfaatkan potensi sumber daya sebagai faktor-faktor produksi yang dapat dijadikan untuk pengembangan usaha.

4. Sebahagian BUMDes yang didirikan belum menunjukkan kinerja yang baik dan efektif terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Sebahagian besar BUMDes yang dibentuk masih mengandalkan dana penyertaan Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sehingga harapan untuk dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari segi efektivitas pendiriannya belum terpenuhi secara keseluruhan.
6. Masih adanya sebahagian besar jenis usaha yang dikelola BUMDes tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sebahagian besar masyarakat desa,
7. Sebahagian pengelola BUMDes kurang memperhatikan distribusi dan alokasi layanan berupa ketercukupan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
8. Sebahagian pengelola BUMDes kurang memahami visi misi dan tujuan didirikannya organisasi BUMDes dan bagaimana memulai aktivitas usahanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada kinerja organisasi BUMDES di Kabupaten Gorontalo yang ditinjau dari kompetensi, budaya organisasi dan perilaku wirausaha pengelola dalam peningkatan kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang telah diungkapkan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap perilaku wirausaha pengelola BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pengelola terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku wirausaha pengelola BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
5. Apakah terdapat pengaruh perilaku wirausaha pengelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
6. Apakah terdapat pengaruh kompetensi yang dimediasi oleh perilaku wirausaha pengelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
7. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi yang dimediasi oleh perilaku wirausaha pengelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kompetensi terhadap perilaku wirausaha pengelola BUMDes di Kabupaten Gorontalo?
2. Pengaruh kompetensi pengelola terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo.
3. Pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku wirausaha pengelola BUMDes di Kabupaten Gorontalo.
4. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo.
5. Pengaruh perilaku wirausaha pengelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo.
6. Pengaruh kompetensi yang dimediasi oleh perilaku wirausaha pengelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo.
7. Pengaruh budaya organisasi yang dimediasi oleh perilaku wirausaha pengelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gorontalo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menunjang pengembangan khasanah keilmuan konsep atau teori yang berkenaan dengan kompetensi, budaya organisasi, perilaku wirausaha dan kinerja usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kaitannya dengan kompetensi, budaya organisasi, perilaku wirausaha kinerja usaha di Kabupaten Gorontalo.